

PERJANJIAN KINERJA 2020

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

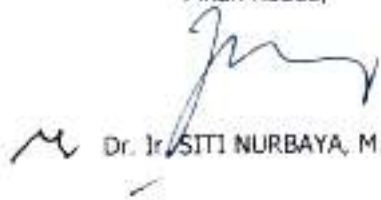
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,


Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemegang Izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	30 Persen
b.	Teramankannya hutan dan gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	3.000.000 Hektar
c.	Terselesainya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	219 Kasus

No.

- Program/ Kegiatan**
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.
 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSUH).
 3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggaran(x Rp.1000,-)
468.790.771

Jakarta, November 2019

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, SH, MM

Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM
NIP. 19640603 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75 Poin
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan
		Layanan Perkantoran	1 layanan

Kegiatan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 Layanan Perkantoran Setditjen PHLHK
Total

Anggaran

Rp. 19.447.009.000,-
 Rp. 2.250.000.000,-
Rp. 33.711.567.000,-
Rp. 55.408.576.000,-

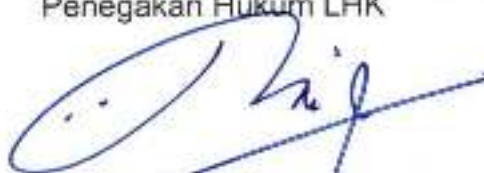
Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
 Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
 Penegakan Hukum LHK



Jasmin Ragil Utomo, SH, MM
 NIP. 19640603 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Februari 2020

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 19630705 198303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75 Poin
		Nilai Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 Poin
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tertib dan Akuntabel	1 Laporan
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan
		Layanan Perkantoran	1 layanan

Kegiatan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 Layanan Perkantoran Setditjen PHLHK
Total

Anggaran

Rp. 19.447.009.000,-
 Rp. 2.250.000.000,-
 Rp. 33.711.567.000,-
Rp. 55.408.576.000,-

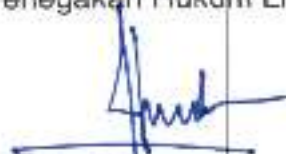
Jakarta, 17 Februari 2020

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Penegakan Hukum LHK



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
 NIP. 19630705 198303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
Jabatan : Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.276.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	18 Operasi
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Layanan

Kegiatan:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan; | Rp. 39.927.263.000,- |
| 2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. 2.855.480.000,- |
| Total | Rp. 42.922.743.000,- |

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



DR Dr. Rasio Ridho Sani, M. Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan



Sustyo Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, SH, MM

Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup,

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM
NIP. 19640603 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran Direktorat PSLH	1 Layanan
2	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	46 Kasus
		Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan terkait DAS Citarum	3 Kasus

1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ;	Rp.	871.850.000,-
2.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ;	Rp.	22.461.000.000,-
	Total	Rp.	23.332.850.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
LHK,



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup,



Jasmin Ragil Utomo, SH, MM
NIP. 19640603 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si

Jabatan : Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

DR Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pengaduan, Pengawasan
dan Sanksi Administrasi

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP 19630705 198303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN dan SANKSI ADMINISTRASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	303 Perusahaan

Anggaran

- | | | | |
|----|--|----|------------------|
| 1. | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp | 1.096.100.000,- |
| 2. | Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Rp | 23.063.000.000,- |
| | | Rp | 24.159.100.000,- |

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pengaduan, Pengawasan
dan Sanksi Administrasi


Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP 19630705 198303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Nurhuda, S.H., M.A

Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana,


Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP 19681209 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	26 Kasus
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	190 Orang

Anggaran

- | | | | |
|----|---|----|------------------|
| 1. | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp | 1.161.379.000,- |
| 2. | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp | 27.099.280.000,- |
| | | Rp | 28.260.659.000,- |


Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK



DR Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
 Direktur Penegakan Hukum Pidana,



Yazid Nurhuda, S.H., M.A
 NIP 19681209 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eduward Hutapea, S.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sumatera




Eduward Hutapea, S.Si
NIP. 19690406 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH SUMATERA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	400.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	21 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	160 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	48 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	4 Orang

Kegiatan :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 28.538.401.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Rp. 24.514.404.000,- |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Rp. 7.762.000.000,- |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <u>Rp. 10.335.000.000,-</u> |

Total Anggaran

Rp. 71.149.805.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



DR Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sumatera



Eduward Hutapea, S.Si
NIP. 19690406 199903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Muhammad Nur, M.S.P

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JR Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Ir. Muhammad Nur, M.S.P
NIP. 19670727 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	354.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	18 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	200 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	24 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	4 Orang

Anggaran :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 26.227.900.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Rp. 17.374.070.000,- |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Rp. 8.250.000.000,- |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <u>Rp. 8.735.000.000,-</u> |

Total Anggaran

Rp. 60.586.970.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



JR Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Ir. Muhammad Nur, M.S.P
NIP. 19670727 199703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subhan, S.Hut, M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

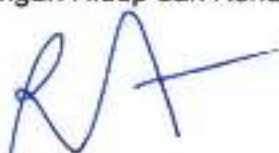
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Kalimantan


Subhan, S.Hut, M.Si
NIP. 19730320 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH KALIMANTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	375.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	20 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	172 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	42 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	25 Orang

Anggaran:


- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 22.167.291.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Rp. 18.745.969.000,- |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Rp. 6.619.500.000,- |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <u>Rp. 14.375.000.000,-</u> |

Total Anggaran

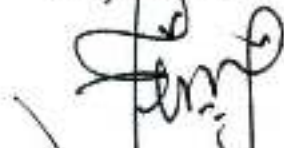
Rp. 61.907.760.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Kalimantan


Subhan, S.Hut, M.Si
NIP. 19730320 199903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dodi Kumiawan, S.Pt., M.H

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sulawesi


Dodi Kumiawan, S.Pt., M.H
NIP. 19751206 199803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH SULAWESI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	325.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	19 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	115 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	25 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	4 Orang

Kegiatan :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 20.166.207.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Rp. 19.553.017.000,- |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Rp. 4.336.750.000,- |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 8.865.000.000,- |


Total Anggaran


Rp. 52.920.974.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sulawesi


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018


Dedi Kurniawan, S.Pt., M.H
NIP. 19751206 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Maluku Papua

Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750610 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH MALUKU PAPUA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	270.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	14 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	50 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	8 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	4 Orang

Kegiatan :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 16.046.907.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Rp. 16.790.277.000,- |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Rp. 2.793.750.000,- |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <u>Rp. 4.165.720.000,-</u> |


Total Anggaran


Rp. 39.796.654.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Maluku Papua

 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

 Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750610 200003 1 002



Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

2020